



PENETAPAN

Nomor 872/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah (istbat Nikah) telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh :

M. FATAH BIN H. MASYKURI, tempat dan tanggal lahir / umur : Tuban 15 Desember 1975 / umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. K. Djonet, RT.14 RW.05, Desa Jatisari, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I ;
dan

ZAKIYATIN NASHIHAH BINTI H. IJTIMA', tempat dan tanggal lahir / umur : Bojonegoro 15 Mei 1989 / umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. K. Djonet, RT.14 RW.05, Desa Jatisari, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut sebagai Para Pemohon:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register Nomor 872/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 Mei 2010, M. FATAH YASIN BIN H. MASYKURI (Pemohon I) dengan ZAKIYATIN NASHIHAH BINTI H.IJTIMA' (Pemohon II) telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di

Penetapan Nomor 872/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah KH. HUSAIN ILYAS, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, dengan Wali Ayah kandung Pemohon II bernama H. IJTIMA' dan yang menikahkan KH.HUSAIN ILYAS;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut dihadiri para kerabat/keluarga dari pihak Pemohon I dan pemohon II juga para tetangga khalayak, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah bapak SAIFUL HIDAYAT dan bapak H.NUR HASYIM dan setelah Wali Nikah dan mempelai pria mengucapkan Ijab Qobul Pemohon I memberikan maskawin berupa seperangkat alat sholat kepada Pemohon II;

3. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara kandung/darah atau saudara sesusuan dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon membina rumah tangga di rumah bersama di Desa Jatisari, RT.04 RW.05, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, dan telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama 1. ISTIBSYAROH, umur 9 tahun, 2. ABDULLOH KHAN, umur 8 tahun, 2.QUDSIYAH, umur 4 tahun, 4. ULFATUN NADHOMAH, umur 1 tahun;

6. Bahwa, Selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan tetap beragama islam hingga saat ini dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa, alasan dan kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah ini kepada Pengadilan Agama Tuban, adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti

Penetapan Nomor 872/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pernikahan Para pemohon, yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon;

8. Bahwa, untuk mengurus sebagaimana tersebut dalam alasan dan kepentingan permohonan ini Para pemohon mengalami kesulitan karena kurangnya persyaratan bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi menurut hukum perkawinan di Indonesia, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan penetapan pernikahan/isbat nikah di Pengadilan Agama Tuban;

9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M.FATAH YASIN BIN H. MASYKURI) dengan Pemohon II (ZAKIYATIN NASHIHAH BINTI H.IJTIMA') yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2010 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan Pengadilan Agama Tuban telah melakukan pengumuman, tentang akan dilaksanakannya sidang isbat nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan secara pribadi, kemudian Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan pihak KUA Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, akan tetapi tidak berhasil, lalu Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon tersebut dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Penetapan Nomor 872/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. FATAH YASIN, NIK 35230515151275002, tertanggal 01 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ZAKIYATIN NASHIHAHRUPIYAH, NIK.3523055505890007, tertanggal 12 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. FATAH YASIN, No.3523050212100004, tertanggal 14 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-176/Kua.13.17.17/PW.01/09/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kementrian Agama Kabupaten Tuban, Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, tanggal 02 September 2020 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Penetapan Nomor 872/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : H. NUR HASYIM BIN H. MASYKURI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sendang, Rt.01, RW.04, Desa Sendang, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 23 Mei 2010, di rumah KH.HUSAIN ILYAS, di Desa Jatisari, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. IJTIMA', yang ijab kabulnya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya antara wali Pemohon II yang diwakilkan kepada bapak KH.HUSAIN ILYAS dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi (H.NUR HASYIM) dan SAIFUL HIDAYAT serta undangan lainnya, dengan maskawin berupa Seperangkat alat Sholat dan dibayar tunai kepada Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak berhubungan nasab yang dilarang kawin, tidak sesusuan dan tidak berhubungan semenda ;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama dalam perkawinan tersebut tidak ada yang mengganggu gugat tentang hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah ataupun duplikatnya dari KUA Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban karena pernikahannya tidak tercatat, padahal Kutipan Akta Nikah tersebut sangat diperlukan oleh para Pemohon untuk kepastian hukum atas pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya sebagai dokumen resmi kependudukan ;

Penetapan Nomor 872/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SYAIFUL HIDAYAT BIN MARWAN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Ngantingan, Rt.01, RW.10, Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Teman Dekat Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 23 Mei 2010, di rumah KH.HUSAIN ILYAS, di Desa Jatisari, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. IJTIMA', yang ijab kabulnya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya antara wali Pemohon II yang diwakilkan kepada bapak KH.HUSAIN ILYAS dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu H. NUR HASYIM dan saksi (SAIFUL HIDAYAT) serta undangan lainnya, dengan maskawin berupa Seperangkat alat Sholat dan dibayar tunai kepada Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak berhubungan nasab yang dilarang kawin, tidak sesusuan dan tidak berhubungan semenda ;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama dalam perkawinan tersebut tidak ada yang mengganggu gugat tentang hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah ataupun duplikatnya dari KUA Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban karena pernikahannya tidak tercatat, padahal Kutipan Akta Nikah tersebut sangat diperlukan oleh para Pemohon untuk kepastian hukum atas pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya sebagai dokumen resmi kependudukan ;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan membenarkan bukti-bukti tersebut dan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi

Penetapan Nomor 872/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini pengadilan menunjuk dan menyatakan bahwa berita acara persidangan tersebut merupakan bagian dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon akan tetapi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara permohonan ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Agama Islam pada tanggal 23 Mei 2010, di rumah KH. HUSAIN ILYAS, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, dengan Wali Ayah kandung Pemohon II bernama H. IJTIMA' dan yang menikahkan KH.HUSAIN ILYAS akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, padahal sekarang ini para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum atas pernikahannya tersebut dan untuk mengurus akta kelahiran anak sebagai dokumen resmi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa berdasar surat permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 sampai P.4, serta keterangan dua orang saksi (H.NUR HASYIM BIN H. MASYKURI dan SYAIFUL HIDAYAT BIN MARWAN), telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan menurut hukum agama Islam, pada tanggal tanggal 23 Mei 2010, di

Penetapan Nomor 872/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah KH. HUSAIN ILYAS, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah yang diwakilkan kepada KH. HUSAIN ILYAS dengan Pemohon I, disaksikan dua orang, maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa pernikahan tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi, pembuktian mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, adalah bukti surat, dalam buktimana tertera hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan tidak ada pihak yang menyangkal maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR ;

Menimbang, bahwa para saksi (H. NUR HASYIM BIN H. MASYKURI dan SYAIFUL HIDAYAT BIN MARWAN), semuanya hidup bertetangga dengan para Pemohon dan terlibat secara langsung dalam prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, kemudian telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka majelis hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena yang tela memenuhi maksud Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 701K/Sip./1974, tanggal 14 April 1976, dan juga sesuai dengan ketentuan pasal 170,171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 Mei 2010, di rumah KH. HUSAIN ILYAS, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan

Penetapan Nomor 872/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan dan fakta seperti tersebut diatas, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun Nikah menurut hukum Islam dan antara Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak berhalangan hukum untuk kawin, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dinyatakan sah karena telah sesuai dengan hukum Agama Islam yang dianut keduanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengemukakan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 10 halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pernikahan dengan merujuk pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya

Penetapan Nomor 872/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim sesuai maksud pasal 19 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi keterangan dan bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon segera diputuskan maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat diakhiri dan segera dibacakan penetapan;

Mengingat, semua pasal perundangan yang berlaku dan Hukum Islam (nash-nash syara') yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M.FATAH YASIN BIN H. MASYKURI) dengan Pemohon II (ZAKIYATIN NASHIHAH BINTI H.IJTIMA') yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2010 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;

Penetapan Nomor 872/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.427.500,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul akhir 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, SH.,MH, serta Drs.H.ABD. ADHIM, MH, sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.,MH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota

Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, SH.,MH

Drs. H. ABD. ADHIM, MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan : Rp300.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan I : Rp 30.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai_____ : Rp 6.000,00

Penetapan Nomor 872/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp427.500,00
(empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 872/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 12 dari 12 hal.